



Kepemimpinan Gereja dan Politik: Keterlibatan Umat Kristen untuk Transformasi Politik Kontemporer

Yudhy Sanjaya¹, Victor
Angsono Huatama², Talizaro
Tafonao³

STT Real Batam¹⁻³

Email Korespondensi:
Yudhysanjaya.ys@gmail.com

DOI:
<https://doi.org/10.54369/ajtpk.v3i2.60>

Keywords:
leadership, transformative,
Christianity, politic,
contemporary, kepemimpinan,
transformatif, Kristen, politik,
kontemporer

Copyright: ©2024. Authors.
License:



Abstract: *The integration of Christian values with technological advances in Christian leadership practice is a relevant challenge in today's digital era. This research aims to explore this combination and identify practical strategies and implications in the context of Christian leadership theory and practice. The research method used is literature analysis and qualitative data collection through literature study. The research results show that, although there is conflict between Christian values and technological advances, there are also opportunities to utilize technology as a tool for strengthening community and spiritual growth. The implications of this research are the need for further research on practical strategies for overcoming these conflicts, longitudinal studies to understand the development of Christian leadership practices in adopting new technology, as well as research on how transformative Christian leadership can influence spiritual and community growth in the long term. Thus, this research makes a significant contribution to the development of Christian leadership theory and practice in the digital era.*

Abstrak: Keterlibatan agama dalam politik telah menjadi topik yang semakin relevan di tengah dinamika politik kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran keterlibatan Kristen dalam transformasi politik saat ini. Latar belakangnya terkait dengan pergeseran pandangan terhadap agama dalam politik dan kompleksitas isu-isu politik global yang terus berkembang. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana keterlibatan Kristen memengaruhi pembentukan kebijakan publik, serta tanggapan mereka terhadap tantangan-tantangan politik kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pola perilaku politik Kristen, dampaknya dalam dinamika politik sosial, dan implikasinya terhadap stabilitas demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas keterlibatan umat Kristen dalam politik serta menawarkan wawasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kontribusi positifnya dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

PENDAHULUAN

alam beberapa dekade terakhir, dinamika politik global telah menjadi semakin kompleks, ditandai oleh tantangan-tantangan yang muncul secara cepat dan berubah-ubah. Polarisasi politik, krisis Dekonomi, isu lingkungan, dan ketegangan geopolitik menciptakan konteks politik yang penuh dengan ketidakpastian. Di tengah-tengah situasi ini, peran agama, termasuk agama Kristen, menjadi semakin relevan dalam diskursus politik. Nilai-nilai moral dan etis yang terkandung dalam agama memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan kebijakan yang adil, damai, dan berkelanjutan. Dengan keadilan, kasih, dan perdamaian sebagai fondasi, keterlibatan agama dalam politik dapat menjadi kekuatan positif untuk perubahan.¹

Hubungan antara agama dan politik telah menjadi salah satu isu yang terus relevan dalam diskursus global. Dalam konteks ini, agama Kristen memegang peranan penting karena memiliki tradisi moral dan etis yang kaya yang dapat menjadi panduan untuk menangani kompleksitas politik modern. Sebagaimana diungkapkan oleh Hauerwas, nilai-nilai Kristen seperti keadilan, kasih, dan perdamaian menawarkan dasar yang kokoh untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya relevan di lingkungan lokal tetapi juga dalam dinamika politik global yang semakin kompleks.² Konteks politik kontemporer saat ini ditandai oleh tantangan besar, seperti meningkatnya polarisasi politik, krisis ekonomi, dan perubahan iklim global. Tantangan-tantangan ini membutuhkan solusi yang tidak hanya pragmatis tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etis. Agama, khususnya Kristen, memiliki potensi unik untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian isu-isu ini. Menurut Volf, keterlibatan umat Kristen dalam politik dapat membantu mendorong transformasi masyarakat melalui penerapan nilai-nilai transformatif yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan penghormatan terhadap martabat manusia.³ Keterlibatan umat Kristen dalam politik, jika dilakukan dengan bijaksana, tidak hanya dapat mendorong transformasi sosial tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk kebijakan publik yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam peran dan potensi gereja dalam menghadapi tantangan politik saat ini.

Sejarah panjang agama, termasuk agama Kristen, telah memberikan dasar yang kuat bagi partisipasi dalam urusan publik. Namun, dalam konteks global yang berubah dengan cepat, pandangan terhadap peran agama dalam politik telah mengalami perubahan signifikan. Di satu sisi, terdapat peningkatan dalam gerakan politik yang berakar pada nilai-nilai agama, yang mencerminkan dorongan untuk memperkuat identitas dan moralitas dalam pembuatan kebijakan.⁴ Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang campur tangan agama dalam urusan negara, yang menimbulkan pertanyaan tentang pluralisme, sekularisme, dan hak asasi manusia.⁵

Dalam konteks ini, penting untuk mengakui kontribusi yang dapat diberikan oleh keterlibatan Kristen dalam politik kontemporer. Agama Kristen memiliki warisan moral dan etis yang kaya, yang dapat membentuk pandangan dan tindakan politik yang berkelanjutan. Dengan nilai-nilai seperti

¹ Adang Sonjaya and Budi Rahayu Diningrat, "Relasi Agama Dan Politik Di Indonesia," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (March 2023): 21–28, <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.82>.

² Stanley Hauerwas, *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics* (University of Notre Dame Press, 1991).

³ Miroslav Volf, "A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good" (Brazos Press, 2011).

⁴ Firdaus M Yunus, Taslim HM Yasin, and Syamsul Rijal, "Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 9, no. September (2023): 121–37.

⁵ "Relasi Agama Dan Politik Menurut Rawls (Telaah Tentang Pancasila Sebagai Public Reason) Oleh: Samsul Ma'arif 1 .," n.d., 189–201.

keadilan, kasih, dan perdamaian sebagai fondasi, keterlibatan Kristen memiliki potensi untuk memperkaya diskursus politik dan membantu membentuk kebijakan yang menguntungkan semua anggota masyarakat.⁶

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi keterlibatan agama, termasuk agama Kristen, dalam politik, baik dalam konteks historis maupun kontemporer. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sonjaya dan Rahayu Diningrat juga telah menggaris bawahi tantangan dan pertanyaan yang terkait dengan keterlibatan agama dalam politik. Penelitian ini menyoroti risiko potensial dari fanatisme agama dan ekstremisme, sementara yang lain mengemukakan kekhawatiran tentang konflik antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip demokrasi liberal.⁷ Salah satu kajian yang merupakan karya Toft, Philpott, dan Shah, yang dalam bukunya *God's Century: Resurgent Religion and Global Politics*, menyoroti kebangkitan kembali peran agama dalam politik global. Mereka mengamati bahwa agama, termasuk Kristen, memainkan peran signifikan dalam pembentukan kebijakan publik, penyelesaian konflik, dan transformasi sosial di berbagai negara.⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan agama dapat menjadi kekuatan positif jika dikelola dengan bijaksana.

Studi lainnya oleh Thomas dalam *The Myth of Religious Violence* menantang narasi tradisional yang melihat agama sebagai sumber utama konflik politik. Thomas berpendapat bahwa keterlibatan agama dalam politik sebenarnya memiliki potensi untuk mendorong keadilan dan rekonsiliasi, asalkan tidak terjebak dalam pola politisasi yang eksklusif.⁹ Di sisi lain, penelitian oleh Appleby dalam *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* menggarisbawahi dualitas peran agama dalam politik. Sementara agama dapat menjadi kekuatan untuk perdamaian dan transformasi sosial, agama juga dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan dan diskriminasi, terutama ketika terpolarisasi oleh kepentingan politik tertentu.¹⁰

Meskipun sejumlah penelitian telah mengeksplorasi hubungan antara agama dan politik, kajian tersebut umumnya berfokus pada dinamika umum keterlibatan agama dalam politik tanpa memberikan perhatian khusus pada peran unik Kristen sebagai kekuatan transformasi politik. Toft, Philpott, dan Shah menyoroti pentingnya agama dalam politik global, tetapi tidak secara mendalam membahas bagaimana nilai-nilai spesifik Kristen seperti kasih, keadilan, dan perdamaian dapat diterapkan dalam konteks kebijakan publik dan transformasi sosial.¹¹ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Thomas telah mengidentifikasi potensi agama, termasuk Kristen, sebagai kekuatan untuk rekonsiliasi dalam politik.¹² Namun, studi ini tidak secara eksplisit menjelaskan mekanisme atau strategi praktis yang dapat diterapkan oleh umat Kristen untuk menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai iman mereka dan prinsip-prinsip demokrasi liberal dalam masyarakat pluralistik.

⁶ Wasisto Raharjo Jati, "Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 133, <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.262>.

⁷ Sonjaya and Rahayu Diningrat, "Relasi Agama Dan Politik Di Indonesia."

⁸ Ronald Boyd-MacMillan, "God's Century: Resurgent Religion and Global Politics, Monica Duffy Toft, Daniel Philpott & Timothy Samuel Shah: Book Review," *International Journal for Religious Freedom* 4, no. 1 (2011): 149–50.

⁹ Scott M Thomas, "The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict" (JSTOR, 2010).

¹⁰ R Scott Appleby, "The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation," *Pro Ecclesia* 12, no. 1 (2003): 116–18.

¹¹ Boyd-MacMillan, "God's Century: Resurgent Religion and Global Politics, Monica Duffy Toft, Daniel Philpott & Timothy Samuel Shah: Book Review."

¹² Thomas, "The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict."

Di Indonesia, penelitian seperti yang dilakukan oleh Panggabean dkk telah mengeksplorasi peran agama Kristen dalam masyarakat plural, tetapi sebagian besar terfokus pada tantangan yang dihadapi, seperti resistensi terhadap dominasi agama mayoritas, tanpa menawarkan analisis mendalam tentang strategi transformasi politik yang relevan dengan konteks kontemporer.¹³ Celah lainnya adalah kurangnya fokus pada kontribusi spesifik umat Kristen dalam mengatasi isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia. Penelitian sebelumnya sering kali mengabaikan pendekatan kontekstual yang menyoroti bagaimana komunitas Kristen lokal dan pemimpin gereja dapat memainkan peran aktif dalam mendukung agenda politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesenjangan penelitian ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan kajian yang lebih spesifik, kontekstual, dan aplikatif. Penelitian yang mengintegrasikan pendekatan teologis dengan dinamika politik kontemporer dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana umat Kristen dapat berkontribusi secara konstruktif dalam membangun kebijakan publik yang adil, memperkuat dialog antaragama, dan mendukung pluralisme tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip iman mereka. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif teologis Kristen dan analisis politik kontemporer untuk mengeksplorasi peran umat Kristen dalam transformasi politik. Tidak seperti studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada tantangan atau dualitas peran agama dalam politik, penelitian ini mengidentifikasi strategi praktis dan konteks spesifik dimana nilai-nilai Kristen, seperti keadilan, kasih, dan perdamaian, dapat diterapkan dalam kebijakan publik. Penelitian ini juga memberikan pendekatan inovatif dalam menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Kristen dengan prinsip demokrasi liberal, sambil menekankan relevansi keterlibatan Kristen dalam isu-isu global seperti keadilan sosial dan pluralisme. Dengan menggabungkan kajian literatur dan studi kasus kontemporer, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan aplikatif yang belum banyak dijelajahi dalam literatur yang ada.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keterlibatan umat Kristen dalam transformasi politik kontemporer dengan menggali kontribusi nilai-nilai Kristen, seperti keadilan, kasih, dan perdamaian, dalam pembentukan kebijakan publik dan dinamika politik global. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi strategi praktis dan pendekatan teologis yang memungkinkan umat Kristen menjembatani prinsip-prinsip iman mereka dengan tuntutan demokrasi liberal serta pluralisme masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana umat Kristen dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam mengatasi isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia, sehingga memperkuat kontribusi mereka dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena keterlibatan umat Kristen dalam politik kontemporer. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif subjektif dan

¹³ Samsu Rizal Panggabean, "Conflict Studies in Indonesia: A Preliminary Survey of Indonesian Publications," *PCD Journal* 4, no. 1–2 (2017): 147–80.

memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap fenomena yang diamati.¹⁴ Melalui wawancara mendalam dengan pemimpin gereja, aktivis Kristen, dan pakar politik, penelitian ini menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai kontribusi nilai-nilai Kristen dalam dinamika politik saat ini. Selain wawancara, observasi partisipan akan digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik keterlibatan Kristen dalam berbagai kegiatan politik, baik di tingkat lokal maupun global. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merinci bagaimana teori dan praktik keterlibatan Kristen berinteraksi dalam konteks sosial-politik yang berkembang.¹⁵

Selain itu, penelitian ini juga akan mengandalkan analisis dokumen sebagai bagian dari metode triangulasi untuk memastikan validitas temuan yang diperoleh. Dokumen yang relevan, seperti pernyataan gereja, manifesto politik Kristen, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan agama, akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan peran agama Kristen dalam politik. Metode ini berlandaskan pada prinsip triangulasi yang dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data.¹⁶ Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana umat Kristen berperan dalam mempengaruhi kebijakan politik dan membentuk narasi politik kontemporer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Gereja dan Politik Kontemporer

Kepemimpinan gereja dalam konteks politik kontemporer telah menjadi topik yang semakin relevan, terutama mengingat dinamika politik global yang terus berkembang. Pemimpin gereja memiliki peran strategis dalam membimbing umat Kristen untuk memahami dan terlibat dalam politik secara konstruktif, berdasarkan prinsip-prinsip etis dan moral yang diajarkan oleh Alkitab. Dalam tradisi Kristen, kepemimpinan tidak hanya mencakup pelayanan kepada komunitas iman, tetapi juga memengaruhi masyarakat luas melalui keadilan, kasih, dan perdamaian.¹⁷ Hal ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan gereja yang mampu menjembatani antara nilai-nilai iman Kristen dengan tuntutan politik modern.

Penting untuk memahami bahwa keterlibatan politik tidak hanya melibatkan partisipasi aktif dalam proses pemilihan atau pengambilan keputusan, tetapi juga membangun narasi politik yang berlandaskan nilai-nilai moral Kristen.¹⁸ Narasi politik yang didasarkan pada nilai-nilai Kristen dapat menjadi pilar dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Pemimpin gereja perlu menggali cara-cara untuk menerjemahkan ajaran Alkitab ke dalam konteks politik, sehingga dapat memberikan panduan yang relevan bagi umat dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti kemiskinan, ketidakadilan, perubahan iklim, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks global yang ditandai oleh pluralisme, sekularisme, dan dinamika politik yang sering kali berorientasi pada kepentingan pragmatis, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan arah moral dan etis bagi umatnya. Kepemimpinan gereja memainkan peran penting

¹⁴ John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016).

¹⁵ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (Sage publications, 2014).

¹⁶ Norman K Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (Routledge, 2017).

¹⁷ J Philip Wogaman, *Christian Ethics: A Historical Introduction* (Westminster John Knox Press, 2010).

¹⁸ J Baird Callicott, *Thinking like a Planet: The Land Ethic and the Earth Ethic* (Oxford University Press, 2013).

dalam membimbing umat menghadapi tantangan politik kontemporer yang semakin kompleks. Pemimpin gereja tidak hanya dipanggil untuk mengajar dan membina umat dalam lingkup spiritual, tetapi juga untuk menjadi agen transformasi sosial dan politik berdasarkan nilai-nilai iman Kristen.¹⁹ Mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ajaran iman tetap relevan dalam konteks masyarakat modern, termasuk dalam hal pengambilan kebijakan publik yang berdampak luas.

Di era modern, pemimpin gereja memiliki kesempatan besar untuk memengaruhi kebijakan publik melalui pendekatan yang berbasis pada keadilan, perdamaian, dan keberlanjutan. Misalnya, penelitian oleh Noll menunjukkan bagaimana pemimpin gereja yang berkomitmen pada prinsip-prinsip Kristen mampu menginspirasi perubahan signifikan dalam masyarakat, terutama dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial.²⁰ Pemimpin gereja yang visioner dapat menjadi inspirasi bagi umat untuk tidak hanya aktif dalam kehidupan gereja, tetapi juga dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Namun, tantangan bagi pemimpin gereja juga tidak sedikit. Mereka sering kali dihadapkan pada tekanan untuk mempertahankan netralitas politik sambil tetap menegaskan nilai-nilai moral yang tidak dapat dikompromikan.

Selain itu, diskusi mengenai kepemimpinan gereja dalam politik kontemporer juga mencakup kebutuhan untuk menciptakan dialog lintas agama dan komunitas. Dialog ini bertujuan untuk membangun harmoni sosial dan mengatasi polarisasi yang sering kali muncul akibat perbedaan ideologi politik. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, gereja dapat menjadi fasilitator untuk menciptakan ruang di mana berbagai kelompok dapat berdialog secara konstruktif dan menemukan solusi bersama untuk tantangan bersama. Dengan demikian, kepemimpinan gereja yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan antara ajaran iman dan tuntutan politik praktis, sehingga gereja tetap relevan sebagai agen perubahan dalam masyarakat modern.

Implikasi dari keterlibatan gereja dalam politik juga melibatkan tantangan untuk menavigasi ketegangan antara iman dan politik tanpa kehilangan integritas spiritual. Pemimpin gereja harus menjaga keseimbangan antara memengaruhi kebijakan publik dengan tetap menghormati keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat. Mereka juga perlu peka terhadap isu-isu lokal dan global yang membutuhkan perhatian gereja, seperti keadilan ekonomi, perubahan iklim, dan hak-hak minoritas. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut dapat menggali bagaimana gereja dapat menggunakan kekuatan moralnya untuk mendorong reformasi kebijakan publik yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, peran kepemimpinan gereja dalam politik kontemporer adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Kristen menjadi bagian integral dari narasi politik. Dengan menjadikan keadilan, kasih, dan perdamaian sebagai prinsip utama, gereja dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Tantangan yang ada tidak boleh menghalangi gereja untuk terus berperan aktif sebagai agen transformasi sosial dan politik. Pemimpin gereja yang bijak akan selalu berupaya untuk menjadikan ajaran iman sebagai landasan dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah, sehingga umat Kristen dapat tetap relevan dan berdampak dalam dunia modern ini.

¹⁹ Walter Brueggemann, *The Practice of Prophetic Imagination: Preaching an Emancipating Word* (Fortress Press, 2012).

²⁰ Mark A Noll, *God and Race in American Politics: A Short History* (Princeton University Press, 2008).

Keterlibatan Umat Kristen dalam Politik

Dalam penelitian ini, berhasil mengidentifikasi beberapa temuan utama yang muncul dari analisis data terkait dengan keterlibatan umat Kristen dalam politik kontemporer. Pertama, kami menemukan bahwa partisipasi Kristen dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya cenderung bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti denominasi agama, tingkat pendidikan, dan kedekatan dengan nilai-nilai politik tertentu. Misalnya, kelompok Kristen yang lebih ortodoks mungkin cenderung lebih konservatif secara politik, sementara kelompok Kristen yang lebih liberal cenderung lebih terbuka terhadap isu-isu sosial.²¹

Selain itu, keterlibatan Kristen dalam politik kontemporer tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup advokasi kebijakan dan aksi sosial. Banyak individu dan kelompok Kristen yang aktif memperjuangkan isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, baik melalui kegiatan sosial di masyarakat maupun melalui advokasi politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.²²

Ketika kami mengeksplorasi berbagai dimensi keterlibatan Kristen dalam politik kontemporer, kami menemukan beberapa pola perilaku yang konsisten dan tren yang signifikan. Salah satunya adalah intensitas kegiatan politik yang lebih tinggi di kalangan kelompok Kristen yang lebih muda dan lebih teredukasi, yang cenderung memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan informasi politik. Selain itu, kami juga mengamati perbedaan signifikan antara denominasi agama dalam hal prioritas politik dan pendekatan terhadap isu-isu kontroversial.²³

Keterlibatan umat Kristen dalam politik kontemporer dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari partisipasi aktif dalam proses politik hingga advokasi terhadap isu-isu sosial yang relevan dengan nilai-nilai iman Kristen. Sebagai warga negara, umat Kristen memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik yang mendukung keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁴ Dalam konteks ini, bentuk keterlibatan dapat mencakup keterlibatan langsung seperti menduduki jabatan publik, berpartisipasi dalam pemilu, atau menjadi anggota partai politik.

Selain itu, umat Kristen juga berperan penting dalam memperjuangkan isu-isu tertentu melalui gerakan sosial dan advokasi. Misalnya, komunitas Kristen di beberapa negara telah menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, melindungi lingkungan, dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan.²⁵ Peran ini sering kali diwujudkan melalui lembaga-lembaga gereja atau organisasi berbasis agama yang bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil.

Namun, keterlibatan politik umat Kristen juga menghadapi tantangan, seperti risiko politisasi agama yang dapat mengarah pada konflik sektarian atau manipulasi nilai-nilai agama untuk

²¹ Markus Dominggus, "Partisipasi Orang Kristen Di Dalam Pemilihan Umum," *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33550/sd.v9i2.333>.

²² Gerli Safira Petonengan et al., "Kajian Teologis Gereja Dan Politik: Analisis Transformasi Hubungan Dan Keterlibatan Kontemporer," *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual* 1, no. 1 (2024): 43–57.

²³ Ferdinan Samuel Manafe, "Sikap Kristen Dalam Arena Politik," *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.52157/me.v6i1.66>.

²⁴ David P Gushee and Glen H Stassen, *Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2016).

²⁵ Jim Wallis, *God's Politics: Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn't Get It* (Zondervan, 2005).

kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, penting bagi umat Kristen untuk mendasarkan keterlibatan politik mereka pada nilai-nilai Alkitabiah yang mendorong inklusivitas dan keadilan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang agama atau keyakinan politik. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat relevansi iman Kristen dalam konteks modern, tetapi juga berkontribusi pada transformasi politik yang bermakna dan berkelanjutan.

Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam perilaku politik di antara kelompok Kristen, kami juga menemukan kesamaan dalam aspirasi mereka untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Banyak responden menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama lintas denominasi dan dengan aktor politik lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua orang. Ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat keragaman dalam praktik politik Kristen, ada nilai-nilai yang bersama-sama mereka anut untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas.

Tantangan dan Hambatan Keterlibatan Kristen dalam Politik

Keterlibatan umat Kristen dalam politik tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mengurangi efektivitas partisipasi mereka dalam proses politik. Salah satu hambatan utama adalah sekularisme, yaitu pemisahan yang tajam antara agama dan politik yang sering kali mengarah pada marginalisasi peran agama dalam kehidupan publik. Sekularisme, yang berkembang pesat dalam banyak negara modern, menuntut agar agama tidak memengaruhi keputusan politik dan kebijakan negara.²⁶ Hal ini menciptakan kesulitan bagi umat Kristen dan pemimpin gereja untuk mengekspresikan nilai-nilai moral dan etika agama dalam ranah politik tanpa dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip sekuler yang ada.

Selain itu, pluralisme agama yang berkembang di masyarakat kontemporer juga menjadi tantangan signifikan. Dalam masyarakat yang semakin majemuk, di mana berbagai agama dan ideologi politik bersaing, keterlibatan politik umat Kristen dapat terhambat oleh kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan pandangan yang bertentangan. Pluralisme dapat menciptakan ketegangan ketika umat Kristen merasa bahwa nilai-nilai mereka terpinggirkan atau dilawan oleh pandangan yang berbeda.²⁷ Ini memperumit upaya untuk membangun konsensus politik yang inklusif, terutama dalam isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial.

Politisasi agama juga menjadi hambatan yang signifikan dalam keterlibatan politik Kristen. Ketika agama digunakan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan atau untuk memperjuangkan agenda tertentu, nilai-nilai agama dapat terdistorsi dan dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh agama itu sendiri.²⁸ Penggunaan agama untuk kepentingan politik ini sering kali menyebabkan polarisasi dan perpecahan di dalam masyarakat, yang justru mengurangi efektivitas keterlibatan umat Kristen dalam menciptakan perubahan politik yang damai dan adil.

²⁶ José Casanova, *Public Religions in the Modern World* (University of Chicago press, 1994).

²⁷ Tariq Modood, *Multiculturalism* (John Wiley & Sons, 2013).

²⁸ Don Handelmann and Galina Lindquist, "RELIGION, POLITICS, AND GLOBALIZATION," *Religion, Politics, and Globalization: Anthropological Approaches* 3 (2011): 1.

Lebih jauh lagi, terdapat konflik antara nilai-nilai agama Kristen dan prinsip-prinsip politik demokrasi liberal. Demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu, pluralisme, dan hak asasi manusia, yang sering kali bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang menekankan ketaatan pada prinsip moral yang lebih absolut dan tradisional.²⁹ Misalnya, dalam isu-isu seperti pernikahan sesama jenis dan hak reproduksi, terdapat ketegangan antara pandangan agama Kristen yang konservatif dengan nilai-nilai liberal yang dipegang oleh banyak negara demokratis.

Tantangan-tantangan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas keterlibatan politik umat Kristen dan pemimpin gereja. Meskipun mereka memiliki potensi untuk memperjuangkan keadilan sosial dan memperkenalkan nilai-nilai moral yang mendalam ke dalam kebijakan publik, hambatan-hambatan tersebut dapat membatasi ruang gerak mereka untuk berperan secara maksimal dalam arena politik. Oleh karena itu, penting bagi umat Kristen untuk menemukan cara-cara yang konstruktif untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui dialog antaragama, pendekatan teologis yang adaptif, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik kontemporer.

Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam perilaku politik di antara kelompok Kristen, kami juga menemukan kesamaan dalam aspirasi mereka untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Banyak responden menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama lintas denominasi dan dengan aktor politik lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua orang. Ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat keragaman dalam praktik politik Kristen, ada nilai-nilai yang bersama-sama mereka anut untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas.

Implikasi dari keterlibatan gereja dalam politik juga melibatkan tantangan untuk menavigasi ketegangan antara iman dan politik tanpa kehilangan integritas spiritual. Pemimpin gereja harus menjaga keseimbangan antara memengaruhi kebijakan publik dengan tetap menghormati keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat. Mereka juga perlu peka terhadap isu-isu lokal dan global yang membutuhkan perhatian gereja, seperti keadilan ekonomi, perubahan iklim, dan hak-hak minoritas. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut dapat menggali bagaimana gereja dapat menggunakan kekuatan moralnya untuk mendorong reformasi kebijakan publik yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, peran kepemimpinan gereja dalam politik kontemporer adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Kristen menjadi bagian integral dari narasi politik. Dengan menjadikan keadilan, kasih, dan perdamaian sebagai prinsip utama, gereja dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Tantangan yang ada tidak boleh menghalangi gereja untuk terus berperan aktif sebagai agen transformasi sosial dan politik. Pemimpin gereja yang bijak akan selalu berupaya untuk menjadikan ajaran iman sebagai landasan dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah, sehingga umat Kristen dapat tetap relevan dan berdampak dalam dunia modern ini.

Hubungan dengan Konteks Sosial-Politik yang Lebih Luas

Dalam melihat hubungan keterlibatan Kristen dalam politik dengan konteks sosial-politik yang lebih luas, ditemukan bahwa suara-suara Kristen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

²⁹ Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory* (University of Notre Dame Press, 2007).

dinamika politik saat ini, baik di tingkat lokal maupun global. Penyelidikan ini mengungkap kaitan erat antara keterlibatan Kristen dan isu-isu sosial-politik yang sedang berkembang, seperti polarisasi politik, populisme, dan ketidakpastian global. Ditemukan bahwa, dalam banyak kasus, keterlibatan Kristen dapat memperkuat polarisasi politik dengan memperkuat pemahaman yang eksklusif tentang identitas agama dan pandangan politik. Fenomena ini terutama terlihat dalam kasus-kasus di mana kelompok-kelompok Kristen memposisikan diri sebagai pembela nilai-nilai tradisional yang dianggap terancam oleh modernitas atau sekularisme. Dalam konteks ini, keterlibatan Kristen cenderung mengadopsi pendekatan yang defensif, yang sering kali menimbulkan ketegangan dengan kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda³⁰. Namun, terdapat pula suara-suara Kristen yang sering kali berperan sebagai pembawa perdamaian dan penengah dalam konflik politik, menciptakan ruang untuk dialog dan rekonsiliasi. Dalam beberapa kasus, keterlibatan Kristen telah menjadi katalisator untuk perdamaian melalui upaya mediasi antara kelompok-kelompok yang bertikai. Misalnya, inisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh pemimpin Kristen sering kali berfokus pada pembangunan jembatan komunikasi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menemukan solusi yang saling menguntungkan. Peran ini menjadi semakin penting dalam situasi di mana ketegangan politik atau sosial mencapai puncaknya dan memerlukan intervensi moral untuk mengurangi eskalasi konflik.

Selain itu, terdapat pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keterlibatan Kristen berinteraksi dengan dinamika politik nasional dan internasional. Ditemukan bahwa suara-suara Kristen sering kali menjadi kekuatan yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, baik di dalam negeri maupun di panggung global. Dalam konteks nasional, keterlibatan Kristen sering diwujudkan melalui advokasi kebijakan yang mendukung kelompok-kelompok marjinal, seperti minoritas agama, masyarakat miskin, dan kaum tertindas. Di tingkat internasional, suara-suara Kristen memainkan peran penting dalam kampanye global untuk mengakhiri perdagangan manusia, mempromosikan perlindungan pengungsi, dan mendorong tindakan nyata terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, keterlibatan Kristen menunjukkan kapasitas untuk menggerakkan perubahan sosial yang progresif dan inklusif.³¹

Namun, tantangan dalam menjaga stabilitas demokrasi juga diidentifikasi, terutama ketika suara-suara Kristen terjebak dalam konflik kepentingan politik atau terancam oleh otoritarianisme dan ekstremisme. Dalam beberapa kasus, keterlibatan Kristen yang tidak bijaksana dapat memperburuk ketegangan politik dengan memperkuat narasi eksklusif yang meminggirkan kelompok lain. Tantangan ini semakin kompleks ketika ideologi politik bercampur dengan doktrin agama, menciptakan risiko politisasi agama yang dapat mengancam pluralisme dan harmoni sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih reflektif dan inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan internal komunitas Kristen tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat luas.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dalam politik kontemporer, evaluasi terhadap peran keterlibatan Kristen menjadi penting untuk merumuskan respons yang berkelanjutan dan berdampak positif. Disadari bahwa suara-suara Kristen memiliki potensi yang besar untuk

³⁰ Yohanes Krismantyo Susanta, "Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2019, <https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.187>.

³¹ Yunus, Yasin, and Rijal, "Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia."

mempengaruhi arah politik dan sosial yang diambil oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kerjasama lintas-agama, mendorong dialog antar-agama, dan mempromosikan nilai-nilai inklusif dan demokratis dalam proses politik perlu ditingkatkan. Kerjasama lintas-agama dapat menjadi platform yang efektif untuk mengatasi polarisasi dengan menekankan kesamaan nilai-nilai kemanusiaan yang melintasi batas agama. Dialog antar-agama juga memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan, sehingga mengurangi potensi konflik yang berbasis pada prasangka atau stereotip.

Diyakini bahwa keterlibatan Kristen dapat menjadi kekuatan yang memperkuat demokrasi dan memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemimpin Kristen memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kontribusi mereka dalam politik didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang menghormati martabat manusia, memperjuangkan keadilan sosial, dan mempromosikan perdamaian. Dengan mengadopsi pendekatan ini, keterlibatan Kristen dapat menjadi teladan dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Keterlibatan Kristen dalam politik kontemporer memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek masyarakat. Dari hasil diskusi, kami menemukan bahwa suara-suara Kristen memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan publik, mempengaruhi dinamika politik nasional dan internasional, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, keterlibatan Kristen juga menghadapi tantangan, seperti polarisasi politik dan risiko fanatisme agama. Oleh karena itu, kami merekomendasikan upaya kolaboratif lintas-agama, dialog antar-agama, dan pembangunan kemitraan yang berkelanjutan untuk memperkuat peran keterlibatan Kristen dalam politik. Langkah-langkah kebijakan yang menghormati kebebasan beragama, mempromosikan inklusivitas, dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis juga sangat penting. Dengan demikian, keterlibatan Kristen dalam politik dapat menjadi kekuatan yang positif dalam memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkuat fondasi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Alfri Sandi, Jhon Retei. "Perilaku Politik Gereja Kristen Evangelis (Gke) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kalimantan Tengah Tahun 2019." *Jurnal Politik Profetik* 8, no. 1 (2020): 37–61. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a2>.
- Appleby, R Scott. "The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation." *Pro Ecclesia* 12, no. 1 (2003): 116–18.
- Boyd-MacMillan, Ronald. "God's Century: Resurgent Religion and Global Politics, Monica Duffy Toft, Daniel Philpott & Timothy Samuel Shah: Book Review." *International Journal for Religious Freedom* 4, no. 1 (2011): 149–50.
- Brueggemann, Walter. *The Practice of Prophetic Imagination: Preaching an Emancipating Word*. Fortress Press, 2012.
- Callicott, J Baird. *Thinking like a Planet: The Land Ethic and the Earth Ethic*. Oxford University

- Press, 2013.
- Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. University of Chicago press, 1994.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications, 2016.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge, 2017.
- Dominggus, Markus. “Partisipasi Orang Kristen Di Dalam Pemilihan Umum.” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33550/sd.v9i2.333>.
- Gushee, David P, and Glen H Stassen. *Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 2016.
- Handelman, Don, and Galina Lindquist. “Religion, Politics, And Globalization.” *Religion, Politics, and Globalization: Anthropological Approaches* 3 (2011): 1.
- Hauerwas, Stanley. *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics*. University of Notre Dame Press, 1991.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 133. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.262>.
- MacIntyre, Alasdair. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press, 2007.
- Manafe, Ferdinan Samuel. “Sikap Kristen Dalam Arena Politik.” *Missio Ecclesiae* 6, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.52157/me.v6i1.66>.
- Modood, Tariq. *Multiculturalism*. John Wiley & Sons, 2013.
- Noll, Mark A. *God and Race in American Politics: A Short History*. Princeton University Press, 2008.
- Nurish, Amanah. “Dari Fanatisme Ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, Dan Tindakan Kekerasan.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 21, no. 1 (2019): 31. <https://doi.org/10.14203/jmb.v21i1.829>.
- Panggabean, Samsu Rizal. “Conflict Studies in Indonesia: A Preliminary Survey of Indonesian Publications.” *PCD Journal* 4, no. 1–2 (2017): 147–80.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*. Sage publications, 2014.
- Petonengan, Gerli Safira, Alvionita Indasari Taidi, Laura Indah Takalamingan, and Yuningsi Metusala. “Kajian Teologis Gereja Dan Politik: Analisis Transformasi Hubungan Dan Keterlibatan Kontemporer.” *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual* 1, no. 1 (2024): 43–57.
- “RELASI AGAMA DAN POLITIK MENURUT RAWLS (Telaah Tentang Pancasila Sebagai Public Reason) Oleh: Samsul Ma’arif 1 .,” n.d., 189–201.
- Sonjaya, Adang, and Budi Rahayu Diningrat. “Relasi Agama Dan Politik Di Indonesia.” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (March 2023): 21–28. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.82>.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. “Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2019. <https://doi.org/10.30648/dun.v4i1.187>.
- Thomas, Scott M. “The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict.” JSTOR, 2010.

- Volf, Miroslav. "A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good." Brazos Press, 2011.
- Wallis, Jim. *God's Politics: Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn't Get It*. Zondervan, 2005.
- Wogaman, J Philip. *Christian Ethics: A Historical Introduction*. Westminster John Knox Press, 2010.
- Yunus, Firdaus M, Taslim HM Yasin, and Syamsul Rijal. "Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 9, no. September (2023): 121–37.